



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-010 /A/JA/01/2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, KEJAKSAAN
NEGERI CIMAHI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT,
KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM DAN KEJAKSAAN NEGERI DOLOK
SANGGUL DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
KEJAKSAAN NEGERI AMPANA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGAH DAN KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU DALAM DAERAH
HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada saat ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Meureudu perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Rincian tugas, wewenang, fungsi dan organisasi di lingkungan Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Meureudu ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Cimahi dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam dan Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Ampara dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Meureudu dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);

8. Peraturan.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Meureudu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/3733/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 13 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM DAN KEJAKSAAN NEGERI DOLOK SANGGUL DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA, KEJAKSAAN NEGERI AMPANA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH DAN KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

PERTAMA : Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun berkedudukan di Mejayan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi daerah hukumnya meliputi wilayah kota Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam berkedudukan di Teluk Dalam daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Nias Selatan, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul berkedudukan di Dolok Sanggul daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Humbang Hasundutan, Kejaksaan Negeri Ampana berkedudukan di Ampana daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Tojo Una-Una dan Kejaksaan Negeri Meureudu berkedudukan di Meureudu daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Pidie Jaya masing-masing sebagai Kejaksaan Negeri Tipe B.

KEDUA.

- KEDUA** : Kedudukan, tugas, dan wewenang serta fungsi dan organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Meureudu adalah sebagaimana ditetapkan dalam BAB XXIII Bagian Ketujuhbelas sampai dengan Keduapuluh Pasal 616 sampai dengan 642 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011.
- KETIGA** : Merubah kedudukan daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Una-Una/Wakai menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Una-Una/Wakai dan kedudukan daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli di Pulau Telo menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Teluk Dalam di Pulau Telo.
- KEEMPAT** : Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Gunungsitoli di Teluk Dalam menjadi aset Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Ampana menjadi aset Kejaksaan Negeri Ampana dan Cabang Kejaksaan Negeri Sigli di Meureudu menjadi aset Kejaksaan Negeri Meureudu.
- KELIMA** : Penempatan para Pejabat Struktural, Jaksa Fungsional dan Staf Cabang Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli di di Teluk Dalam, Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Ampana dan Cabang Kejaksaan Negeri Sigli di Meureudu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Jaksa Agung RI.
- KEENAM** : Nama dan tipe Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Negeri Meureudu sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam Daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, sedangkan bagan organisasi tercantum dalam Lampiran II peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETUJUH** : Sejak berlakunya peraturan ini, di seluruh Indonesia terdapat 31 Kejaksaan Tinggi, 79 Kejaksaan Negeri Tipe A, 320 Kejaksaan Negeri Tipe B dan 83 Cabang Kejaksaan Negeri.
- KEDELAPAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		1-2-11
2.	Karo Cana		31-01-11
3.	Kabag		31-01-11
4.	Kasubbag		31-01-11
5.	Pelaksana		31-01-11
6.	Pengetik		31-01-11


BASRIEF ARIEF

Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : PER- 010 /A/JA/01/2011

Tanggal : 28 Januari 2011

**DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA**

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH	1	BANDA ACEH	A	1	SIGLI DI KOTA BAKTI
		2	SABANG	B		
		3	SIGLI	B		
		4	LHOKSEUMAWE	B		
		5	LANGSA	B		
		6	TAKENGON	B		
		7	MEULABOH	B		
		8	TAPAKTUAN	B		
		9	KUTACANE	B	3	TAPAKTUAN DI BAKONGAN
		10	BIREUEN	B		
		11	LHOKSUKON	B		
		12	IDI	B		
		13	KUALA SIMPANG	B		
		14	SINABANG	B		
		15	CALANG	B		
		16	SINGKEL	B		
		17	BLANGKEJEREN	B		
		18	JANTHOI	B		
		19	BLANGPIDIE	B		
		20	SUKAMAKMUE	B		
		21	SIMPANG TIGA REDELONG	B		
		22	MEUREUDU	B		
II	SUMATERA UTARA DI MEDAN	1	MEDAN	A	1	LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU
		2	BINJAI	A		
		3	PEMATANG SIANTAR	A		
		4	SIBOLGA	A		
		5	LUBUK PAKAM	A	2	LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
		6	TEBING TINGGI	B	3	RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG
		7	TANJUNG BALAI	B		
		8	RANTAU PRAPAT	B		
		9	KABANJAHE	B	4	KABANJAHE DI TIGA BINANGA
		10	SIDIKALANG	B	5	TARUTUNG DI SIBORONG- BORONG
		11	TARUTUNG	B		
		12	PADANG SIDEMPUAN	B	6	PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK
					7	PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN
					8	PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA
		13	GUNUNGSITOLI	B	9	KISARAN DI LABUHAN RUKU
		14	KISARAN	B	9	
		15	SIANTAR	B	10	STABAT DI PANGKALAN BRANDAN
		16	STABAT	B		
		17	BELAWAN	B		
		18	BALIGE	B		
		19	PANYABUNGAN	B	11	BALIGE DI PORSEA
					12	BALIGE DI PANGURURAN
					13	PANYABUNGAN DI KOTANOPAN
					14	PANYABUNGAN DI NATAL
		20	SEI RAMPAH	B	15	TELUK DALAM DI PULAU TELO
		21	TELUK DALAM	B		
		22	DOLOK SANGGUL	B		

1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	PADANG BUKITTINGGI PAYAKUMBUH PARIAMAN SAWAHLUNTO SOLOK PADANG PANJANG BATUSANGKAR LUBUK SIKAPING PAINAN SIJUNJUNG LUBUK BASUNG TUA PEJAT SIMPANG EMPAT PULAU PUNJUNG PADANG ARO	A A B B B B B B B B B B B B B	1 2 3 4 5 6	PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU PAYAKUMBUH DI SULIKI SOLOK DI ALAHAN PANJANG PAINAN DI BALAI SELASA LUBUK BASUNG DI MANINJAU SIMPANG EMPAT DI TALU
IV	RIAU DI PEKANBARU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	PEKANBARU RENGAT DUMAI BENGKALIS TEMBILAHAN BANGKINANG PASIR PANGARAIAAN SIAK SRI INDRAPURA TELUK KUANTAN PANGKALAN KERINCI UJUNG TANJUNG	A B B B B B B B B B	1	BENGKALIS DI SELAT PANJANG
V	JAMBI DI JAMBI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAMBI MUARA BULIAN MUARA BUNGO SUNGAI PENUH BANGKO KUALA TUNGKAL SAROLANGUN MUARA TEBO MUARA SABAK SENGETI	A B B B B B B B B B	1 2	MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG
VI	SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	PALEMBANG KAYU AGUNG BATURAJA LAHAT LUBUK LINGGAU MUARA ENIM SEKAYU PRABUMULIH PAGAR ALAM PANGKALAN BALAI	A B B B B B B B B	1 2 3 4	BATURAJA DI MARTAPURA BATURAJA DI MUARA DUA LAHAT DI TEBING TINGGI MUARA ENIM DI PENDOPO

1	2	3	4	5	6	7
XI	JAWA TENGAH DI SEMARANG	1	SEMARANG	A	1	SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
		2	SURAKARTA	A		
		3	PEKALONGAN	A		
		4	MAGELANG	A		
		5	PURWOKERTO	A		
		6	TEGAL	A		
		7	PATI	A		
		8	CILACAP	A		
		9	KUDUS	B		
		10	KLATEN	B		
		11	SALATIGA	B		
		12	REMBANG	B		
		13	PEMALANG	B		
		14	PURBALINGGA	B		
		15	PURWOREJO	B		
		16	KEBUMEN	B		
		17	SRAGEN	B		
		18	KENDAL	B		
		19	BLORA	B		
		20	BOYOLALI	B		
		21	BREBES	B		
		22	DEMAK	B		
		23	JEPARA	B		
		24	KARANGANYAR	B		
		25	SUKOHARJO	B		
		26	WONOGIRI	B		
		27	BANJAR NEGARA	B		
		28	TEMANGGUNG	B		
		29	WONOSOBO	B		
		30	BANYUMAS	B		
		31	BATANG	B		
		32	PURWODADI	B		
		33	AMBARAWA	B		
		34	SLAWI	B		
		35	MUNGKID	B		
		36	K A J E N	B		
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1	YOGYAKARTA	A		
		2	SLEMAN	A		
		3	WONOSARI	B		
		4	WATES	B		
		5	BANTUL	B		
XIII	JAWA TIMUR DI SURABAYA	1	SURABAYA	A		
		2	MALANG	A		
		3	JEMBER	A		
		4	KEDIRI	A		
		5	MADIUN	A		
		6	PASURUAN	A		
		7	BOJONEGORO	A		
		8	BONDOWOSO	A		
		9	PAMEKASAN	A		
		10	SIDOARJO	A		
		11	KEPANJEN	A		
		12	BANYUWANGI	A		

1	2	3	4	5	6	7
		13	BLITAR	A		
		14	MOJOKERTO	B		
		15	PROBOLINGGO	B		
		16	JOMBANG	B		
		17	PONOROGO	B		
		18	GRESIK	B		
		19	LUMAJANG	B		
		20	TULUNG AGUNG	B		
		21	TRENGGALEK	B		
		22	NGANJUK	B		
		23	MAGETAN	B		
		24	TUBAN	B		
		25	NGAWI	B		
		26	SUMENEP	B		
		27	LAMONGAN	B		
		28	SAMPANG	B		
		29	BANGKALAN	B		
		30	PACITAN	B		
		31	SITUBONDO	B		
		32	BANGIL	B		
		33	KRAKSAAN	B		
		34	TANJUNG PERAK	B		
		35	B A T U	B		
		36	KABUPATEN KEDIRI	B		
		37	KABUPATEN MADIUN	B		
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A		
		2	SINGKAWANG	A		
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B	1	SANGGAU DI ENTIKONG
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
		11	SEKADAU	B		
XV	KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA	A		
		2	SAMPIT	B		
		3	KUALA KAPUAS	B	1	KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
		4	MUARA TEWEH	B		
		5	PANGKALANBUN	B		
		6	BUNTOK	B		
		7	PURUK CAHU	B		
		8	TAMIANG LAYANG	B		
		9	KASONGAN	B		
		10	KUALA PEMBUANG	B		
		11	SUKAMARA	B		
		12	NANGA BULIK	B		
		13	KUALA KURUN	B		
		14	PULANG PISAU	B		

1	2	3	4	5	6	7
XVI	KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BANJARMASIN KANDANGAN KOTABARU MARTAPURA AMUNTAI BARABAI TANJUNG RANTAU PLEIHARI MARABAHAN BANJARBARU BATULICIN PARINGIN	A B B B B B B B B B B B B		
XVII	KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BALIKPAPAN SAMARINDA TENGGARONG TANAH GROGOT TANJUNG REDEP TARAKAN NUNUKAN BONTANG TANJUNG SELOR SENDAWAR SANGATTA MALINAU PENAJAM	A A A B B B B B B B B B B		
XVIII	SULAWESI UTARA DI MANADO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MANADO TONDANO KOTAMOBAGU TAHUNA BITUNG TOMOHON AMURANG MELONGUANE AIRMADIDI	A B B B B B B B B	1 2 3 4	KOTAMOBAGU DI BAROKO KOTAMOBAGU DI DOMUGA TAHUNA DI SIAU MELONGUANE DI BEO
XIX	SULAWESI TENGAH DI PALU	1 2 3 4 5	PALU LUWUK TOLI-TOLI POSO AMPANA	A B B B B	1 2 3 4 5 6 7 8 9	LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR POSO DI KOLONADALE POSO DI TENTENA POSO DI BUNGKU AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI

1	2	3	4	5	6	7
XII	BALI DI DENPASAR	1	DENPASAR	A	1	KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA
		2	SINGARAJA	A		
		3	KLUNGKUNG	B		
		4	BANGLI	B		
		5	AMLAPURA	B		
		6	GIANJAR	B		
		7	NEGARA	B		
		8	TABANAN	B		
XXIII	NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM	1	MATARAM	A		
		2	PRAYA	B		
		3	SELONG	B		
		4	SUMBAWA BESAR	B		
		5	R A B A	B		
		6	DOMPU	B		
XXIV	NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG	1	KUPANG	A	1	KUPANG DI SEBA (SEBU)
		2	S O E	B		
		3	KEFAMENANU	B		
		4	ATAMBUA	B	2 3 4	LARANTUKA DI WAIWERANG RUTENG DI REO RUTENG DI LABUHAN BAJO
		5	ENDE	B		
		6	MAUMERE	B		
		7	LARANTUKA	B		
		8	RUTENG	B		
		9	BAJAWA	B		
		10	WAINGAPU	B		
		11	WAIKABUBAK	B		
		12	KALABAHI	B		
		13	LEWOLEBA	B		
		14	BAA	B		
		15	LABUAN BAJO	B		
		16	OELAMASI	B		
XXV	MALUKU DI AMBON	1	AMBON	A	1 2 3 4 5 6	AMBON DI BANDANAERA AMBON DI SAPARUA MASOHI DI GESER MASOHI DI PIRU MASOHI DI WAHAI TUAL DI WONRELI
		2	MASOHI	B		
		3	TUAL	B		
		4	SAUMLAKI	B		
		5	NAMLEA	B		
		6	DOBO	B		

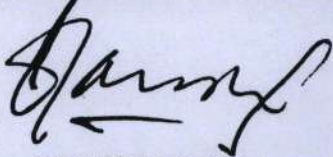
1	2	3	4	5	6	7
XXVI	PAPUA DI JAYAPURA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE WAMENA NABIRE SERUI TIMIKA	A B B B B B B B B B		
XXVII	MALUKU UTARA DI SOFIFI	1 2 3 4 5 6	TERNATE SOASIU TOBELO LABUHA SANANA WEDA	B B B B B B	1 2	TERNATE DI MOROTAI TERNATE DI JAILOLO
XXVIII	BANTEN DI SERANG	1 2 3 4 5 6	SERANG TANGERANG TIGARAKSA PANDEGLANG RANGKASBITUNG CILEGON	A A A B B B		
XXIX	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG	1 2 3 4 5 6 7	PANGKAL PINANG SUNGAILIAT TANJUNG PANDAN MENTOK MANGGAR TOBOALI KOBAL	A B B B B B B	1	SUNGAILIAT DI BELINYU
XXX	GORONTALO DI KOTA GORONTALO	1 2 3 4 5	LIMBOTO GORONTALO TILAMUTA SUWAWA MARISA	B B B B B	1	LIMBOTO DI KWANDANG.

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		2	B A T A M	A		
		3	TANJUNG BALAI KARIMUN	B		
		4	R A N A I	B	3	RANAI DI TAREMPA
		5	DAIK LINGGA	B		
J U M L A H		79/320		A/B	83	

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		24-1-11
2.	Karo Cana		21-01-2011
3.	Kabag		21-01-2011
4.	Kasubbag		21-01-2011
5.	Pelaksana		21-01-2011
6.	Pengetik		21-01-2011

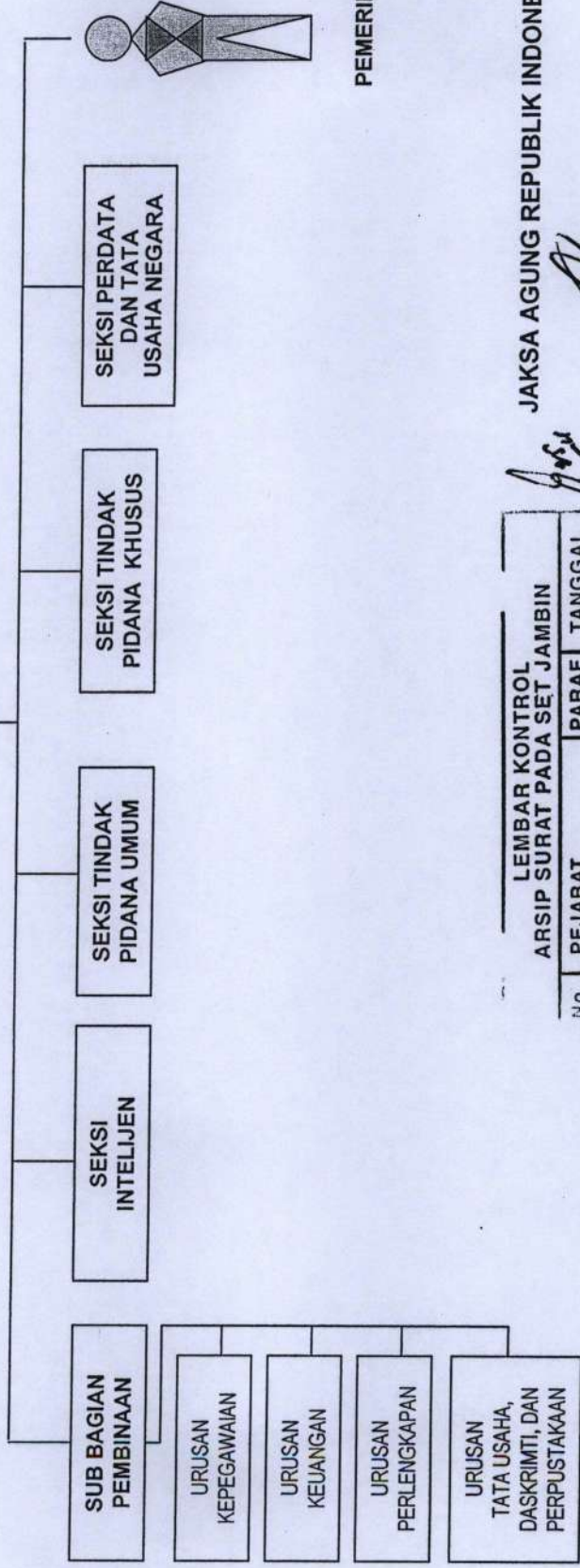
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN,
KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM,
KEJAKSAAN NEGERI DOLOK SANGGUL, KEJAKSAAN NEGERI
AMPANA DAN KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU

Lampiran II : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER- 010 AJJA/ 01/2011
Tanggal : 28 Januari 2011.

KEJAKSAAN NEGERI TIPE B



LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN					
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL		
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	24-1-11		
2.	Karo Cana	<i>[Signature]</i>	21-01-2011		
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	21-01-2011		
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	21-01-2011		
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	21-01-2011		
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	21-01-2011		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

BASRIEF ARIEF